



## JK Keluhkan Inspektorat Kerap Tempat Buangan Pejabat

JAKARTA, SP - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengeluhkan jabatan-jabatan di inspektorat atau lembaga pengawasan internal di suatu instansi pemerintah, kerap diisi oleh pejabat yang ti-

tidak memiliki kompetensi di bidang pengawasan.

Menurut JK, kondisi itu menjadi salah satu penyebab korupsi masih sering ditemukan di tubuh pemerintahan.

• Baca Halaman 7

### Hal 1 ■ jk keluhkan

Pada kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, Madura, yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Agustus lalu, kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan bahkan menjadi salah satu pejabat yang diduga terlibat korupsi.

"Kadang-kadang di banyak tempat, inspektorat itu menjadi tempat pembuangan. Padahal untuk mengisi jabatan di sana, dibutuhkan orang yang mengerti, orang yang pintar

tentang audit, tentang pengawasan," ujar JK, memberikan kuliah umum kepada peserta program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

Selain itu, JK menyampaikan, faktor subjektivitas menjadi sebab inspektorat kerap tidak efektif menjalankan perannya sebagai lembaga pengawasan internal. "Memang tidak mudah juga mengawasi teman. Seperti in-

spektorat yang di (pemerintah) daerah itu. Dia mengawasi temannya sendiri. Ini menjadi persoalan juga," ujar JK.

JK menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang merancang suatu sistem pengawasan terpadu terhadap instansi-instansi pemerintah, di mana pengawasan, tidak sekadar menjadi tanggung jawab Inspektorat lembaga itu.

Sistem itu direncanakan melibatkan KPK, Badan Pengawas Keuangan (BPK), hingga Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP). Dengan demikian, ruang gerak seorang pejabat untuk melakukan korupsi diharapkan semakin menyempit.

"Kita sedang membahas adanya suatu *link* antara BPK, BPKP, inspektorat. Mereka saling tukar menukar pengalaman, dan juga data. Kalau ada kesalahan, bagaimana prosesnya supaya dibawa ke BPK, BPKP langsung. Sehingga pihak yang menjadi inspektorat berasal dari luar, bukan dari dalam," ujar JK. (viv/lis)